

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad, M. Fajar & Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta : UII Pres.
- Abdulkadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Agus Pandoman, 2017. *Teknik Pembuatan Akta-Akta Notaris*, Yogyakarta: Raga Utama Kreasi.
- Alwesius, 2019, *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Notaris*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cetakan Pertama, 2019.
- Badudu dan Sutan Mohammad Zain, 2010. *Efektivitas Bahasa Indonesia*, Jalarta, Balai Pustaka.
- Daeng Naja, 2012. *Teknik Pembuatan Akta*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Denny Saputra, 2017, *Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik*, Jurnal Akta
- Djoni S. Gazali, dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Freddy Haris & Leny Helena, 2017. *Notaris Indonesia*, Jakarta: Lintas Cetak Publishig.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie dan Sjaifurrahman, 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju.
- Habib Adjie, 2008a. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2008b. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2010, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Habib Adjie, 2013. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama, Cetakan Ketiga.

- Habib Adjie, 2014. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Habib Adjie, 2015. *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Surabaya: PT. Refika Aditama.
- Hans Kelsen, 2008, *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerjemah, Raisul Muttaqien; Penyunting, Nurainun Mangunsong, Bandung : Cetakan Keenam, Nusa Media.
- Herlien Budiono, 2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Ira Koesmawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Jonatan Sarwono, 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Julista Mustamu, 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik: Untuk Organisasi Publik dan Non Profit*, Jakarta, Grasindo.
- Liliana Tedjosaputro, 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Lilis Hartanti, 2015. *Bahasa & Produk Hukum*, Bandung: Refika Aditama.
- Lumban Tobing, 1992, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga.
- Lukman Ali, 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo.
- M. Luthfan Hadi Daurus, 2017. *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, UII Press.
- Muammar Himawan, 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, Jakarta: Bina Ilmu,
- Munir Fuady, 2017. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Nico, 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*. Yogyakarta, Center for Documentation and Studies of Business Law.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Putri A.R, 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, Jakarta: Sofmedia.
- Raden Soegondo Notodisoerjo, 1993. *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, Cetakan Kedua, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Salim H S,, 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoriti, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Mataram: Raja Grafindo Persada.
- Sjaifurrachman dan Habib Adji, 2017, *Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung : CV. Mandar Maju.

Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam PembuatAkta*, Surabaya: Mandar Maju.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soesanto, 1982, *Tugas, Kewajiban, dan Hak-hal Notaris.- wakil Notaris (sementara)*, Jakarta :Pranadnya Pammita.

Suhrawardi K. Lubis, 2002. *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007

Titik Triwulan dan Shinta, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Wahab, 2008. *Tujuan Penerapan Program*, Jakarta: Bulan Bintang

Yulis Tiena Masriani, 2008. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Sinar Grafika.

Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Kamus :

Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ebta Setiawan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus versi *online/daring* (dalam jaringan), pengertian autentik, diakses dari <https://kbbi.web.id/autentik.html>, tanggal 28 September 2022.

W.J.S. Poerwadarminta, 1991. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah Kembali oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: Balai Pustaka.

Lukman Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Apollo.

Tesis :

Helmi Fariska Rahma, Tanggung Jawab Dan Akibat Hukum Notaris Dalam Melakukan Identifikasi Dan Verifikasi Data Pengguna Jasa Dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017, *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia*, Yogyakarta, 2018.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, Denpasar, 2018.

Boysal Parulian, *Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Universitas Sumatera Utara, 2016).

Jurnal

Abikusna, R Agus. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Pemerintahan Daerah.” *SOSFILKOM: Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* XIII, no. 23 (2019): 1–15.

Djafar, Wahyudi. “Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 5 (2016): 151–174.

Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab”, *Jurnal Pro Justicia* Edisi IV, Bandung: Universitas Parahyangan.

Bella Okladea Amanda, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Di Dalam Pembuatan Akta Yang Sempurna”, *Jurnal Retical Review*, Vol. 4, No. 1 Tahun 2022.

Dea Derika, “Fungsi Notaris Dalam Pemeriksaan Identitas Penghadap Terhadap Autentisitas Akta Dihubungkan Dengan Asas Kehati-Hatian”, *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* , Volume 18, Nomor 2, Tahun 2020.

Dedy Pramono, “Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.

Fikri Ariesta R. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap” *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2, Vol. 3, Juli 2018.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, I Gusti Ketut Ariawan, “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Universitas Udayana, 2017 -2018.

Kerina Maulidya Putri, Ichsan Anwary dan Diana Haiti, “Kewajiban Notaris melakukan Pembacaan dan Penandatanganan Akta di Depan Semua Pihak secara Bersama-Sama”, *Notary Law Journal*, Volume 1, Issue 2, April 2022.

Marthinus Mesak Mandala, “Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017”, *Officium Notarium*, No. 2, Vol. 1, Agustus 2021.

Moh. Saleh, Rinda Aveyuana Djami, “Pertanggungjawaban Notaris Akibat Ketidakhati-hatian”, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Volume 10 Nomor 1, 2023.

Nina Khadijah Maulidia, Gde Made Swardhana, “Kewenangan Notaris Dalam Mengenali Pengguna Jasa dan Perlindungan Hukum Jika Terjadi Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Acta Comitasi: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2 Agustus 2020.

Ricky Wie Lawa, “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Menjalankan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”, *Jurnal Proyuris*, Vol. 3 No. 1 April 2021.

Vina Akfa Dyani, “Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2017

Sumber Lain

Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan. “SIPSN - Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional.” *SIPSN*. Last modified 2021. Accessed December 18, 2022. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>.

Philipus M. Hadjon. *Tentang Wewenang*. Surabaya, n.d.

KOP NOTARIS

FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE PERORANGAN (PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

A. Informasi Dasar Pengguna Jasa	
1	Nama Lengkap : _____
2	Nama Alias (jika ada) : _____
3	No. Identitas : _____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
4	Nomor Pendapatan Wajib Pajak : _____
5	Tempat dan tanggal lahir : _____
6	Kewarganegaraan : _____
7	Alamat tempat tinggal : _____
8	Alamat domisili : _____
9	Alamat di negara asal (jika WNA) : _____
10	Nomor telepon : <input type="checkbox"/> Rumah _____ <input type="checkbox"/> HP _____
11	Jenis kelamin : <input type="checkbox"/> Laki-Laki <input type="checkbox"/> Perempuan
12	Status pernikahan : <input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Lainnya, _____
B. Informasi Pekerjaan dan Sumber Pendapatan	
1	Sumber Pendapatan/Kekayaan : <input type="checkbox"/> Pekerjaan (Gaji, Bonus, Pensiun, Saham) <input type="checkbox"/> Profesi (Pengacara, Dokter, Akuntan, dll) <input type="checkbox"/> Kepemilikan Usaha Lainnya (jelaskan) _____
2	Bidang Usaha : _____
3	Pekerjaan : _____
	- Nama Kantor : _____
	- Alamat Kantor : _____
	- Nomor Telepon Kantor : _____
	- Jabatan : <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
4	Pendapatan Rata-Rata per Tahun : <input type="checkbox"/> ≤ 12 juta <input type="checkbox"/> >12 juta - 120 juta <input type="checkbox"/> >120 juta - 1.2 M <input type="checkbox"/> >1.2 M
5	Tujuan Transaksi : _____
C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) *)	
*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)	
1	Nama Lengkap : _____
2	Nama Alias (jika ada) : _____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	No. Identitas : _____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
4	Tempat dan tanggal lahir : _____
5	Kewarganegaraan : _____
6	Alamat tempat tinggal : _____
7	Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing) : _____
8	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : _____
9	Hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan Pemilik Manfaat : _____
D. Informasi Jasa Yang Diberikan	
1	Nama Notaris : _____
2	Jasa yang diberikan : _____

Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.

KOP NOTARIS

FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE KORPORASI (PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

A. Informasi Dasar Pengguna Jasa

1	Nama Korporasi	:	_____
2	Bentuk Korporasi	:	_____
3	No. SK Pengesahan	:	_____ Tanggal _____
4	No. Ijin Usaha	:	_____ Tanggal _____
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	_____
6	Alamat Korporasi sesuai Akta	:	_____
7	Alamat Lokasi Usaha	:	_____
8	Nomor Telepon Korporasi	:	_____
9	Nomor Faksimili (jika ada)	:	_____
10	Bidang usaha	:	_____
11	No. Akta Pendirian atau Akta Kepengurusan Terakhir	:	_____

B. Informasi Kekayaan Korporasi

1	Sumber Dana	:	_____
2	Bidang Usaha	:	_____
3	Pendapatan Rata-Rata per Tahun	:	_____
4	Tujuan Transaksi	:	_____

C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) *)

*) Jika ada (diatur lebih lanjut dalam Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019)

1	Nama Lengkap	:	_____
2	Nama Alias (jika ada)	:	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	No. Identitas	:	_____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
4	Tempat dan tanggal lahir	:	_____
5	Kewarganegaraan	:	_____
6	Alamat tempat tinggal	:	_____
7	Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing)	:	_____
8	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	_____
9	Hubungan antara Korporasi dengan Pemilik Manfaat	:	_____

D. Informasi Kuasa Korporasi

1	Hubungan Hukum Pengguna jasa	:	<input type="checkbox"/> Direktur Utama <input type="checkbox"/> Komisaris Utama <input type="checkbox"/> Direktur <input type="checkbox"/> Komisaris Pemegang Saham Lainnya
2	No. Surat Kuasa	:	_____ Tanggal _____
3	Penandatanganan Surat Kuasa	:	_____ Jabatan _____
4	Nama Lengkap Pengguna Jasa	:	_____
5	Nama Alias (jika ada)	:	_____
6	No. Identitas Pengguna Jasa	:	_____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
7	Tempat dan tanggal lahir	:	_____
8	Kewarganegaraan	:	_____
9	Alamat tempat tinggal	:	_____

E. Informasi Jasa Yang Diberikan

1	Nama Notaris	:	_____
2	Jasa yang diberikan	:	_____

Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.

KOP NOTARIS

FORMULIR CUSTOMER DUE DILIGENCE UNTUK PERIKATAN LAINNYA (LEGAL ARRANGEMENT)

(PP No. 43 Tahun 2015 dan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

A. Informasi Dasar Pengguna Jasa

1	Nama	:	_____
2	No. Identitas	:	_____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
3	No. SK Pengesahan (jika Korporasi)	:	_____ Tanggal _____
4	No. Ijin Usaha (jika Korporasi)	:	_____ Tanggal _____
5	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	_____
6	Alamat	:	_____
8	Nomor Telepon	:	_____
9	Nomor Faksimili (jika ada)	:	_____
10	Bidang usaha (jika Korporasi)	:	_____
11	No. Akta Pendirian atau Akta Kepengurusan Terakhir (jika Korporasi)	:	_____

B. Informasi Kekayaan

1	Sumber Dana	:	_____
2	Bidang Usaha	:	_____
3	Pendapatan Rata-Rata per Tahun	:	_____
4	Tujuan Transaksi	:	_____

C. Informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

1	Nama Lengkap	:	_____
2	Nama Alias (jika ada)	:	_____
3	No. Identitas	:	_____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
4	Tempat dan tanggal lahir	:	_____
5	Kewarganegaraan	:	_____
6	Alamat tempat tinggal	:	_____
7	Alamat di negara asal (jika Warga Negara Asing)	:	_____
8	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	_____
9	Informasi Pemilik Manfaat atas Perikatan Lainnya	:	<input type="checkbox"/> Pemilik Manfaat <input type="checkbox"/> Penerima Manfaat <input type="checkbox"/> Pengelola Harta Kekayaan <input type="checkbox"/> Lainnya, _____ <input type="checkbox"/> Penjamin

D. Informasi Pihak dalam Legal Arrangement

1	Nama Lengkap	:	_____ <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	Nama Alias (jika ada)	:	_____
3	No. Identitas	:	_____ <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> Paspor <input type="checkbox"/> SIM
4	Tempat dan tanggal lahir	:	_____
5	Kewarganegaraan	:	_____
6	Alamat tempat tinggal	:	_____
7	Hubungan Hukum Pengguna Jasa	:	_____
8	No. Perjanjian	:	_____ Tanggal _____
9	Penandatanganan Perjanjian	:	_____

E. Informasi Jasa Yang Diberikan

1	Nama Notaris	:	_____
2	Jasa yang diberikan	:	_____

Bahwa seluruh data tersebut di atas adalah benar dan lengkap.

_____, _____

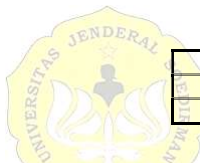
KOP SURAT NOTARIS

Penilaian Tingkat Risiko
(diisi oleh Notaris dan satu kesatuan dengan Form CDD)

- 1 Nama Pengguna Jasa _____
2 Nomor Identitas (untuk perorangan) _____

Analisa Orang yang Populer secara Politik (Analisis Politically Exposed Person (PEP))
(Berdasarkan Permenkumham No. 9 Tahun 2017)

- 1 Apakah Pengguna Jasa adalah PEP? Ya Tidak
- 2 Nama Lengkap PEP? _____
- 3 PEP Lokal atau Asing Lokal Asing
- 4 Warga Negara PEP Ya Tidak
- 5 Apakah terdapat berita negatif terkait PEP
(lampirkan berita) Ya Tidak
- 6 Jabatan PEP Eksekutif
 Yudikatif
 Legislatif
 Negara asing/yurisdiksi asing
 Organisasi internasional
- 7 Hubungan Pengguna Jasa dengan PEP Klien sendiri
 Anggota keluarga Sampai dengan derajat kedua
 Pihak yang terkait atau Close Associate dari PEP



A. Profil Pengguna Jasa dan/atau BO

1	Pengusaha/Wiraswasta	8
2	Pengurus Parpol	8
3	Pegawai Swasta	8
4	Pedagang	8
5	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	7
6	Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk Pensiunan)	7
7	Bertindak berdasarkan Kuasa	7
8	TNI/POLRI (termasuk Pensiunan)	6
9	Profesional dan Konsultan	6
10	Korporasi Perkumpulan TidakBadan Hukum	6
11	Korporasi Perkumpulan Badan Hukum	6
12	Korporasi CV, Firma, dan Maatschap	6
13	Pegawai Money Changer	5
14	Korporasi Perseroan Terbatas	5
15	Korporasi Koperasi	5
16	PNS (termasuk Pensiunan)	4
17	Pegawai Bank	4
18	Petani	3
19	Pengajar dan Dosen	3
20	Pelajar/Mahasiswa	3
21	Korporasi Yayasan	3
22	Ibu Rumah Tangga	3
23	Lain-Lain	3

B. Profil Bisnis Pengguna Jasa dan/atau BO		
1	Perdagangan	9
2	Pertambangan	7
3	Kontraktor	7
4	Transportasi barang dan orang	6
5	Perindustrian	6
6	Pembiayaan	5
7	Pembangunan Properti	5
8	Pertanian	4
9	Perkebunan	4
10	Perikanan	4
11	Konsultan	4
12	Usaha sewa menyewa	3
13	Perbankan	3
14	Lain-lain	2
C. Profil Wilayah Pengguna Jasa dan/atau BO		
1	DKI Jakarta	8
2	Jawa Barat	7
3	Jawa Timur	6
4	Bali	5
5	Banten	5
6	Jawa Tengah	5
7	Kalimantan Timur	5
8	Kepulauan Riau	5
9	Lampung	5
10	Riau	5
11	Sulawesi Selatan	5
12	Sumatera Utara	5
13	Aceh	4
14	Bangka Belitung	4
15	Bengkulu	4
16	Kalimantan Barat	4
17	Kalimantan Tengah	4
18	Maluku Utara	4
19	Nusa Tenggara Timur	4
20	Papua	4
21	Sulawesi Barat	4
22	Sulawesi Tengah	4
23	Sulawesi Tenggara	4
24	Sulawesi Utara	4
25	Sumatera Selatan	4
26	DI Yogyakarta	3
27	Gorontalo	3
28	Jambi	3
29	Kalimantan Selatan	3
30	Kalimantan Utara	3
31	Maluku	3
32	Nusa Tenggara Barat	3
33	Papua Barat	3
34	Sumatera Barat	2



D. Profil Negara Asal Pengguna Jasa dan/atau BO		
1	Tax Haven Country	7
2	Amerika	7
3	RRT (Tiongkok)	5
4	Malaysia	5
5	Asia lainnya	5
6	Australia dan Selandia Baru	5
7	Eropa	4
8	Singapura	3
9	Afrika	3
E. Profil Jasa yang diberikan oleh Notaris		
1	Pengelolaan terhadap Uang, Efek, dan/atau Produk Jasa Keuangan lainnya	8
2	Pengoperasian dan Pengelolaan Perusahaan	8
3	Pengelolaan Rekening Giro, Rekening Tabungan, Rekening Deposito, dan/atau Rekening Efek	7
4	Pembelian dan Penjualan Properti	6
5	Pengurusan Pembelian dan Penjualan Badan Usaha	6
6	Penitipan Pembayaran Pajak terkait Pengalihan Property	4
7	Pengurusan Perizinan Badan Usaha	3
8	Lain-lain	2

*) Berdasarkan hasil SRA Notaris 2018

Keterangan Penilaian

Nilai

Profil Pengguna Jasa	
Bisnis pengguna jasa	
Wilayah asal pengguna jasa	
Negara asal pengguna jasa	
Jasa Notaris yang digunakan oleh pengguna jasa	
Total Nilai	

Kategori Risiko Pengguna Jasa
Range Nilai Tinggi = 32 - 40
Range Nilai Sedang = 22 - 31
Range Nilai Rendah = 12 - 21

<input type="checkbox"/>	Tinggi
<input type="checkbox"/>	Sedang
<input type="checkbox"/>	Rendah

KOP SURAT NOTARIS

INFORMASI TAMBAHAN PENGGUNA JASA BERISIKO TINGGI

DATA PENGGUNA JASA

A. Perorangan/ Pribadi

1. Nama Lengkap :
.....
2. Jenis Identitas : KTP SIM PASSPOR KITAS
3. Nomor Identitas :
.....
4. Tempat / Tanggal Lahir :
.....
5. Alamat Sesuai Identitas :
.....
.....
6. Jenis High Risk Customer : PEP Pihak Terkait PEP
 Transaksi Negara High Risk Berdasar Penilaian Risiko
7. Metode Pembayaran :
.....
8. Tujuan Transaksi : Digunakan sendiri Lain- lain :
9. Sumber Kekayaan : Gaji/Upah Lain- lain :
10. Nama Perusahaan
Tempat Bekerja :
.....
11. Jumlah Penghasilan (per BLN) : 3-25 Juta 25-50 Juta 50-100 Juta ≥100 Juta

Jakarta, ... Januari 2019

(Nama Petugas)